

## TAJUK RENCANA

### Pemulihan Ekonomi Melalui Desa Wisata

**PEMULIHAN** ekonomi tercepat, diharapkan melalui desa wisata, pasca dihantam Pandemi Covid-19. Harapan ini dikemukakan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Abdul Halim Iskandar (KR 26/2). Karena itulah, PDDT meluncurkan lomba promosi desa wisata nusantara selama penuh yang berhadiah Rp 1 miliar.

Harapan Menteri PDDT wajar, karena memang setelah dihantam Pandemi lebih dari 2 tahun, masyarakat jenuh. Sehingga dengan adanya promosi desa wisata nusantara akan mengembalikan semangat untuk berwisata. Meskipun sebenarnya, saat Pandemi tetap saja desa wisata di Yogya diserbu wisatawan. Setiap libur panjang selalu saja desa wisata di Yogya kedatangan wisatawan.

Sejumlah desa wisata melaporkan mulai menggeliat meski belum bisa semuanya. Apalagi pemerintah mengumumkan, bahwa masyarakat boleh mudik. Larangan untuk tidak mudik dicabut, jika menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga akhir April 2022 jika dua dosis vaksinasi bisa diselesaikan 70%. Maka jika target itu tercapai, warga sudah bisa lenggang kangkung bersilaturahmi dengan keluarga di Hari Raya Idul Fitri 1443 H, secara normal tanpa takut pembatasan.

Data terakhir, menurut Menteri Kesehatan saat ini sudah 190 juta dosis pertama sudah disuntikan, artinya sudah lebih dari 70 persen dari target vaksinasi. Sedang dosis kedua baru 69 persen. Maka seandainya vaksinasi ini akan menjadi penentu, apakah kita bisa pulang ke kampung halaman dengan nyaman atau masih ada pembatasan (KR 1/3). Kalau bisa terlaksana, seperti yang diharapkan Menteri PDDT Abdul Halim Iskandar, desa wisata akan mempercepat pemulihan ekonomi rakyat.

Belum lama ada penjurian desa wisata DIY yang digelar oleh Dinas Pariwisata DIY yang melibatkan unsur praktisi dan media massa. Dari catatan kunjungan, memang se-

jumlah desa wisata mulai bangkit.

Bahkan dengan kreativitas masing-masing yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi kita. Karena di desa wisata tentu melibatkan penjualan souvenir, kuliner yang khas serta aktivitasnya. Belum lagi transportasi juga akan hidup, selain perhotelan atau home stay masing-masing desa yang unik.

Kini desa wisata memang dilirik kementerian PDDT, khususnya untuk menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) atau Bumdes Bersama. Sebelumnya Desa Wisata adalah urusan kementerian Pariwisata. Memang realitasnya Desa Wisata masih perlu uluran tangan pemerintah untuk pengembangan. Bukan hanya untuk pengembangan secara fisik, namun secara Sumber Daya Manusia sangat perlu. Apalagi sudah dicanangkan kanal digital sebagai keharusan, karena lebih praktis dan mudah.

Kementerian PDDT menyatakan akan mengembangkan aplikasi desa wisata nusantara, yakni aplikasi yang seluruhnya untuk promosi desa wisata nusantara, yang juga promosi untuk wisata desa. Dalam bahasa Menteri PDDT éJangan aplikasi yang itu-itu saja. Lomba yang kemudian digelar adalah lomba promosi desa wisata.

Namun yang harus diprioritaskan berikutnya, adalah masalah SDM dengan segala fasilitasnya. Tidak semua desa wisata siap dikunjungi, agar wisatawan yang datang tidak kecewa sehingga bukan hyanya menimbulkan kesan buruk atau kumuh, namun tidak akan diulang lagi datang ke desa wisata tersebut. Karena itulah, menurut kita benahi juga fasilitas desa wisata dan SDM, sebelum promosi besar-besaran. Benahi mulai dari SDM misalnya pemandu wisata yang ramah dan cakap, paket yang berkualitas dan konsisten CHSE yang harus prioritas dan transportasi yang aman, serta dan sehat. Karena itu, sebaiknya antara Kementerian Pariwisata dan PDDT duduk Bersama membahas agar lebih klop. \*\*\*

## Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru Versus Staf

**AKHIR-AKHIR** ini di media sosial, khususnya oleh akun para guru Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ramai dibicarakan tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan dengan tagar #saveguruDIY. Mengapa tagar ini bermunculan, pasti ada hal ikhwalnya. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) rupanya faktor penyebab ungghahan itu marak. Oleh para guru dianggap pelaksanaan TPP ada ketidakadilan cukup tajam ketika dibandingkan dengan Tenaga Kependidikan atau Staf Tata Usaha sekolah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat 1 menyebutkan, setiap guru yang melaksanakan tugas profesional berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Berangkat dari regulasi inilah semua guru yang telah mempunyai Sertifikat Pendidik berhak mendapatkan Tunjangan Sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok dipotong pajak sesuai pangkat dan golongan. Di masa ini guru merasa betul-betul diapresiasi sebagai Pegawai Negeri yang mempunyai kemartabatan berbeda dengan Pegawai Negeri lainnya.

Perlakuan berbeda terhadap sesama pegawai negeri seolah menjadikan kecemburuan pegawai negeri yang bukan guru. Sebagai 'peredam' atas perlakuan berbeda ini banyak disikapi oleh beberapa daerah dengan melahirkan kebijakan baru bernama Tunjangan Perbaikan Penghasilan. Untuk guru yang sudah menerima Tunjangan Sertifikasi sebesar satu kali gaji tidak termasuk dalam kategori ini secara mutlak. Artinya, diberikan tetapi hanya sebatas perasaan saja. Memang, setiap pemerintah daerah berbeda-beda dalam penerapan aturan main TPP ini. Kebanggaan yang dulunya dirasakan oleh setiap guru profesional kini mulai tergerus bahkan hilang seiring lahirnya TPP yang kurang berpihak pada profesi guru.

Di lapangan memang data menunjukkan besaran TPP yang diterimakan kepada guru sangat berbeda dengan staf.

### Samsuri Nugroho

Perbedaan sangat dirasakan oleh semua guru pada kategori apapun dibanding staf, mulai dari kepala sekolah, guru bersertifikat pendidik, dan apalagi yang belum bersertifikat. Sementara untuk deretan staf tenaga kependidikan tertinggi ada pada kepala tata usaha (berkisar Rp 6.500.000,-) yang jauh di atas TPP kepala sekolah (berkisar Rp 2.000.000,-). Dengan alasan sudah mendapat Tunjang Profesi



KR-JOKO SANTOSO

Guru maka TPP guru biasa (Rp 950.000,-) jauh di bawah staf tata usaha non struktural (Rp 3.500.000,-). Dan yang paling terasa kepiluan dirasakan guru PNS yang belum bersertifikat pendidik yang perolehannya sangat jauh di bawah staf biasa seorang PNS. Melihat data tersebut penulis yang pernah menjadi guru PNS merasa berempati sekaligus ikut terpancing untuk melihat persoalan sebenarnya.

Persoalan menjadi jelas dan sangat beres-alasan jika sekarang guru merasakan kegelisahan. Ketika masa TPP belum lahir, keberadaan guru di sekolah menjadi kunci strategis keberhasilan proses pembelajaran. Pengakuan atas keberadaannya yang sangat penting itu, apresiasi finansial yang 'berlebih' pun diberikan. Saat ini, para guru merasa kurang dihargai

karena TPP yang diterima lebih rendah dari staf. Pasti pendapat para guru seperti ini tidak bermaksud mengatakan keberadaan staf kurang berfungsi. Peran penting dalam ketugasannya sebagai pendidik seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi seolah kandas tertelan adanya perbedaan TPP dengan staf. Sementara staf atau biasa disebut tenaga kependidikan, ranah pekerjaannya lebih bersifat membantu kelancaran berlangsungnya penyelenggaraan proses belajar mengajar di sekolah.

Penulis yang sudah tidak aktif lagi sebagai guru pun beropini bahwa penerapan TPP di sekolah perlu ditinjau ulang agar tidak terjadi kegelisahan guru yang berkepanjangan. Tagar #saveguruDIY jika terus merebak, sedikit banyak akan berpotensi menurunkan kualitas guru dalam melaksanakan tugas profesinya, sekali pun tidak sampai pada gerakan yang lebih tajam.

Para guru DIY selama ini adalah para pendidik profesional yang paham persis makna arti kemuliaan guru, sehingga hal-hal yang kontra produktif pasti tidak dipilih untuk dilakukan. Solusi atas permasalahan ini yang paling tepat adalah adanya kebijakan baru dengan memihak pada keadilan, sehingga tidak perlu adanya Tunjangan Perbaikan Penghasilan Guru versus Staf. Semoga. (\*)

\*)Samsuri Nugroho,

Penulis adalah Anggota Dewan Pakar PGRI DIY.

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

## Polemik Pengeras Suara dan Sikap Tengah

**SEPERTI** kisah lama yang terulang lagi. Secara resmi Menteri Agama (Menag) menerbitkan surat edaran (SE) dengan nomor 05 tahun 2022. Inti penting dari edaran ini adalah aturan terkait penggunaan pengeras suara masjid dan musola. Ini mengingatkan saya pada kasus Meiliana yang divonis penjara karena protesnya atas pengeras suara. Hal hampir senada datang dari istri sutradara Hanung Bramantyo, Zaskia Adya Mecca. Pada April 2021, ia memprotes pengeras suara di dekat tempat tinggalnya karena dinilai tidak etis cara menggunakannya. Kedua kasus di atas tentu menuai atensi baik positif maupun negatif.

Sama seperti kedua kasus itu, apa yang baru-baru ini dilakukan Menag mengundangi hal serupa. Ada pihak pro dan kontra ketika Menag melayangkan surat edaran disertai potongan video. Ini sungguh de javu yang berulang dan barangkali akan terus berulang. Tidak akan pernah ada suara yang seragam ketika membahas ihwal aturan pengeras suara. Salah satu hal yang menjadi pemicunya karena ia membawa sentimen agama. Meski tidak semuanya, sebagian yang menolak menganggap hal demikian membatasi umat Islam. Di saat bersamaan, ada pihak yang tersinggung karena analogi yang dilakukan Menag dengan gonggong anjing.

Saya kira apa yang dilakukan Menag dengan analoginya tidak sepenuhnya salah. Karena tidak sepenuhnya benar, ia juga tidak sepenuhnya benar. Jika ingin berada di sikap tengah pada problem ini, maka jalan yang dilakukan adalah mengonsep dengan elegan pengaturan pengeras suara tersebut. Saya memahami, apa yang dilakukan oleh Menag dengan analoginya tidak hendak menyamakan orang azan dengan gonggong anjing. Ia hanya ingin menyampaikan sua-

### Moh Rofqil Bazikh

tu analogi di mana sebetulnya suara yang berlebih (apalagi bising) tidak membuat nyaman. Namun, barangkali ini menjadi kealpaan Menag, ia seandainya bisa memilih dengan analogi lain. Ada banyak alternatif ketika akan melakukan analogi dalam konteks itu. Ketika analoginya dengan sesuatu yang sangat sensitif justru akan terjadi gejala baru.

Tidak cukup sampai di situ. Jika Menag bersungguh-sungguh dan tidak hanya sekedar melayangkan surat edaran, ada langkah konkret yang harus dilakukan. Entah itu sosialisasi dengan ketua ormas dan semacamnya. Kalau ihwal aturan pengeras suara hanya sebatas wacana berupa surat edaran yang terjadi hanya keributan. Sementara tujuan dari dilayangkannya surat edaran tersebut ternyata tidak terealisasi dengan baik. Sehingga, yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh Menag adalah hal yang sia-sia. Saya yakin, Menag tidak senang dengan pekerjaan yang sia-sia, bukan?

Dari itu, catatan di sini terakhir dengan polemik pengeras suara ada dua. Pertama, hendaknya hal tersebut diedarkan dan dikemas dengan sebaik mungkin. Hanya dengan cara ini, barangkali umat tergerak hatinya untuk memahami duduk perkara. Dengan ini pula tidak akan ada analogi antara pengeras suara di masjid dengan gonggong anjing. Meski, untuk problem yang terakhir saya tidak menganggap mutlak keliru. Hanya saja - perlu dicatat baik-baik - 'hanya saja' ku-

rang elegan dan terlalu sensitif. Kedua, ada langkah konkret yang ditempuh Menag. Soal bagaimana langkah tersebut, itu mutlak bukan wilayah saya, Menag pasti lebih mampu memahami dan memikirkan.

Selain itu, posisi kita sebagai umat yang paling ideal adalah berada di posisi tengah. Tidak terlalu condong terhadap Menag yang dalam hal ini kurang ideal memberi analogi. Juga tidak memihak kepada pihak kontra yang membabi buta karena menganggap hal tersebut pembatasan ruang gerak Islam. Sikap yang ideal dan sungguh elegan dalam kasus ini tidak lain adalah berada di pihak tengah. Hanya sikap moderat yang mungkin kita lakukan dalam hal ini. Setelah diingatkan, bukankah Menag juga mengusung visi moderat?

\*)Moh Rofqil Bazikh,

Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang bermukim di Bantul.

## Pojok KR

Idul Fitri mendatang boleh mudik bebas.  
-- Asal tetap jaga agar mudik nyaman tetap sehat.

Delegasi Ukraina-Rusia berunding.  
-- Angin segar, karena perang pasti menyengsarakan.

Indikasi pelaksanaan prokes turun.  
-- Makanya, angka terpapar Covid-19 makin naik.

*Berabe*

## PIKIRAN PEMBACA

Naskah bisa dikirim Email atau WA

[pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com) 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat  
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.

Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.  
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

### Gedung DPRD Rp 42 Miliar, Jangan Lupakan Rakyat

**MEMBACA** di Kedaulatan Rakyat, bahwa saat ini segera dibangun Gedung DPRD Kabupaten Gunung Kidul dibangun menelan anggaran sebesar Rp 42 miliar. Luar biasa. Bangunan berlantai 4 tersebut, diharapkan pembangunan dimulai April 2022 ini. Tentu Gedung para wakil rakyat akan sangat megah di wilayah kabupaten yang sering kekecewaan itu. Mudah-mudahan biaya

sebesar itu untuk Gedung wakil rakyat bisa menambah semangat, gairah baru para wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebab dibangun dari uang rakyat. Mudah-mudahan bisa menjadikan Gedung tempat rakyat mengadu dan berkeluh kesah. Jangan hanya besar gedungnya, tetapi tumpul pada nasib rakyat Gunungkidul.

Sukarman, Minggir, Sleman.

### Hati-hati Obat Kedaluwarsa

**MASA** pandemi Covid-19 memang luar biasa, jumlah produksi obat. Macam-macam obat diproduksi, dan memang sangat diperlukan masyarakat. Sekarang ini jenis obat baru bermunculan di mana-mana toko obat dan apotek. Saya hanya berharap mudah-mudahan karena saking banyak memproduksi obat, sehingga ada yang kadaluwarsa

tetapi tetap dijual dengan asumsi banyak warga tidak tahu obat. Asal beli tanpa memperhatikan kadaluwarsa. Karena itu kita berharap agar kita semua, warga masyarakat ikut mengawasi. Jika membeli obat lihat tanggal kadaluwarsanya. Mudah-mudahan bermanfaat.

Ny Ameliawati, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul 55182.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Musbahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabadari, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklanryk23@yahoo.com](mailto:iklanryk23@yahoo.com), [iklanryk13@gmail.com](mailto:iklanryk13@gmail.com)

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). Alamat e-mail: [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsh, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.